

Wisata Alam Kopi Mangrove di Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan, Madura: Peluang dan Tantangan dalam Optimalisasi Upaya Menambah Nilai Biji Mangrove

Campina Illa Prihantini^{1*}, Akh. Fawaid², dan Hasbiadi¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka, 93517, Indonesia;

²Ekonomi Islam, STIE Bakti Bangsa Pamekasan, Kompleks Pondok Pesantren Az Zubair Tlanakan, Pamekasan, 69317, Indonesia;

*Alamat korespondensi : campinailla26@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 03-10-2022
Direvisi: 22-11-2022
Dipublikasi: 30-12-2022

ABSTRACT/ABSTRAK

Mangrove Coffee Natural Tourism in Lembung Village, Pamekasan Regency, Madura: The Opportunity and Challenge in Optimization to Increase the Value of Mangrove Seed

Keywords:
Added value,
Mangrove coffee,
Mangrove forest,
Natural tourism,
Pamekasan Regency

Pamekasan regency is one of the districts that have a wide of mangrove forest. Unfortunately, the mangrove forest was not exploited optimally by the society who lived around the beach or mangrove forest. One of the common mistakes often done by the society was the transformation of their functions as a protector from abrasion into salt fields. It was regrettable, especially about indirect benefits could be accepted by some parties, one of them was the community around there. The main problem in this research was that the community has not fully utilized the mangrove forest area, especially mangrove seeds as a potential additional income for the community. The aims of this research were (1) to identify the condition of mangrove coffee natural tourism in Lembung, Galis, Pamekasan Village and (2) to develop a strategy for developing mangrove coffee natural tourism in Lembung Village, Galis, Pamekasan. This research used qualitative descriptive analysis. In addition, space analysis and SWOT analysis were also conducted to assure the result of the studies and research on the potential and challenges exploiting of mangrove forest in Lembung village, Pamekasan. The result of this research shown that the mangrove forest in Pamekasan were in poor condition. This was proved by the increasingly effort to transform the function of them into salt fields. Participation of society who joined in tourism group (Darwis) gave the solution of exploiting mangrove forest can be exploited optimally, one of them was exploiting of mangrove seed as mangrove coffee. Researcher gave some recommendations for the government to get opportunities, Mangrove Coffee Natural Tourism as an alternative tourism destination that are expected to increase original regional income (PAD) Pamekasan. In its development, the governments have to pay attention to several aspects, including environmental aspect, social aspect, and economical aspect.

Kata Kunci:
Hutan mangrove,
Kabupaten Pamekasan,
Kopi mangrove, Nilai
tambah, Wisata alam

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas hutan mangrove yang cukup luas. Luasnya hutan bakau ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berada di sekitar pantai atau hutan mangrove. Salah satu kesalahan yang umum dan sering dilakukan oleh masyarakat adalah pengalihan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung

dari abrasi menjadi lahan garam. Hal ini sangat disayangkan, terlebih manfaat tidak langsung dapat diterima oleh berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat yang berada di sekitar hutan mangrove. Masalah utama dalam penelitian ini yakni masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan kawasan hutan mangrove, khususnya biji mangrove sebagai salah satu potensi pendapatan tambahan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini yakni, (1) mengidentifikasi kondisi wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Galis, Pamekasan dan (2) menyusun strategi pengembangan wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Galis, Pamekasan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selain itu, analisis ruang dan analisis SWOT juga dilakukan untuk mempertajam hasil kajian dan penelitian mengenai potensi dan tantangan pemanfaatan hutan mangrove di Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya upaya pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi lahan garam. Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Darwis) memberikan secercah cahaya agar pemanfaatan hutan mangrove benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah pemanfaatan buah mangrove sebagai kopi mangrove. Peneliti memberikan rekomendasi agar Pemerintah dapat menangkap peluang, wisata alam kopi mangrove ini sebagai salah satu alternative destinasi wisata yang diharapkan mampu mendongkrak pendapata asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Dalam pengembangannya, Pemerintah juga harus memerhatikan beberapa aspek, di antaranya, aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi.

PENDAHULUAN

Hutan mangrove dikenal dengan hutan bakau. Selama ini, tanaman ini dikenal sebagai tanaman penangkal ombak yang berada di sejumlah kawasan pesisir di Indonesia (Surayya dkk., 2020; Arfan dkk., 2022). Salah satu kawasan pesisir pantai adalah Pulau Madura. Hutan mangrove sendiri merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh pasang-surutnya air laut dan hutan ini selalu tumbuh di kawasan dimana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Pertumbuhan hutan mangrove di Pulau Madura sendiri, seringkali tidak mendapat perhatian masyarakat, bahkan dapat dikatakan mendapat perlakuan kejam, misalnya terjadi pengalihfungsian lahan, perusakan, penebangan, hingga tindakan pencabutan tanaman mangrove. Hal ini berdampak terhadap kelestarian hutan mangrove yang tidak optimal dan merata di Pulau Madura.

Selain itu, kawasan pesisir yang mulanya diperuntukkan untuk hutan mangrove, dialihfungsikan menjadi penggunaan yang lain, salah satunya adalah untuk pengelolaan tambak

garam. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Febryano dkk. (2015) menyebutkan bahwa hutan mangrove juga dialihfungsikan menjadi tambak udang. Selama tahun 1990-an budidaya udang telah mengakibatkan degradasi mangrove di banyak negara berkembang (Cruz-Torres, 2000).

Hutan mangrove di Pulau Madura rata-rata berada di atas lahan milik PT Perhutani sebagai hutan lindung (KPH, 2015). Namun, pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove, PT Perhutani melibatkan masyarakat sekitar lahan hutan mangrove. Hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan, tumbuh dan berkembang di empat Kecamatan, yakni Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Tlanakan. Secara keseluruhan, hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan tersebar di 20 desa.

Dinas Perhutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (2015) menyatakan bahwa luas lahan hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan adalah seluas 1,174.53 Ha dengan rincian sebagai berikut seluas 714.53 Ha dalam kondisi yang baik, seluas 42.00 Ha berada di kondisi sedang, dan seluas 418.00 Ha berada dalam kondisi yang rusak. Terdapat lima desa yang hutan

mangrovenya berada di dalam kawasan dalam hutan, yakni Desa Lembung, Kecamatan Galis seluas 25.00 Ha, Desa Pandan, Kecamatan Galis seluas 62.90 Ha, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu seluas 90.70 Ha, dan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu seluas 43.90 Ha. Dari beberapa desa tersebut, Desa Lembung, Kecamatan Galis memiliki potensi untuk dijadikan desa percontohan untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan wisata alam kopi mangrove.

Kecamatan Galis sendiri memiliki luas wilayah 31.86 km², yang diapit beberapa kecamatan. Wilayah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Larangan, wilayah selatan dengan Kecamatan Pademawu, wilayah barat dengan Kecamatan Pademawu, sedang wilayah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kecamatan Pademawu (BPS, 2015). Temperatur rata-rata di wilayah ini berada dalam range 30°C hingga 28°C. Rata-rata ketinggian permukaan laut adalah 5 Meter. Rata-rata kelembaban udara adalah sebesar 80%.

Desa Lembung sendiri, memiliki penduduk sebanyak 1.353 orang dengan rincian sejumlah 674 orang laki-laki dan sejumlah 679 orang perempuan. Desa ini terdiri atas empat dusun, yakni Dusun Lembung Tengah (rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani atau mengelola ladang sawah dan petambak garam), Dusun Lembung Utara (masyarakatnya berprofesi sebaga petani). Dua dusun lainnya, yakni Dusun Bangkal dan Dusun Bengkaleng, masyarakatnya selain bekerja sebagai nelayan, ada pula menjadi pelestari hutan mangrove dan pemanfaat kopi mangrove (BPS, 2015). Di Dusun Bangkal terdapat petak 61A dengan luas 3,8 Ha hutan mangrove dengan panjang ± 4 Km dan diperkirakan 30,000 pohon mangrove tertanam di lahan tersebut. Sementara, di Dusun Bungkaleng terdapat petak 61B dengan luas 25.0 Ha dan terdapat 260,000 pohon mangrove sudah tertanam di lokasi tersebut (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pamekasan, 2015).

Adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) "SABUK HIJAU", yang dibentuk masyarakat Desa Lembung, Kecamatan Galis dengan 22 orang anggota, yang melakukan pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan terhadap ± 290,000 pohon mangrove yang berada di atas lahan seluas 25.00 Ha. Selama ini, kelompok tersebut melakukan pemanfaatan terhadap buah mangrove atau lebih dikenal dengan kopi mangrove yang hanya diproduksi dan dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Selain untuk pemanfaatan produksi kopi

mangrove, lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata alam kopi mangrove. *Grand Design* pembangunan wisata alam kopi mangrove juga tengah digarap. Namun, perhatian pemerintah setempat dan akses jaringan dengan pihak ketiga, sampai saat ini belum ada. Sehingga, kelompok tani hutan masih fokus menyiapkan infrastruktur sederhana bagi pengunjung yang akan mengunjungi wisata alam kopi mangrove. Padahal, jika wisata alam kopi mangrove tersebut dikembangkan, maka akan menambah pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, dapat membangun ekonomi kerakyatan di sekitar lokasi wisata alam kopi mangrove. Tambunan (2010) menyebutkan bahwa buah lontar merupakan salah satu produk sumberdaya unggulan daerah yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional perlu digali dan dikembangkan sehingga hal yang sama dapat dilakukan terhadap kopi mangrove. Triyanti dkk. (2017), Syah dkk. (2019), dan Lugina dkk., (2019) juga menjelaskan bahwa pohon mangrove (termasuk di dalamnya buahnya) memiliki nilai ekonomi serta potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kondisi wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Galis, Pamekasan dan (2) menyusun strategi pengembangan wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Galis, Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian pada penelitian problematika pengembangan wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis Pamekasan ini, ialah pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data, pendalaman materi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, menjadi salah satu landasan penelitian ini yang dipadukan dengan landasan terori yang sudah ada. Wawancara mendalam dibutuhkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang pengelolaan wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006). Responden yang terpilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penetapan

sampel dengan cara sengaja dipilih oleh peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang akan diwawancarai. Responden dalam penelitian ini ialah anggota Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau" Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kelompok Tani Hutan dibentuk oleh masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove dimana tujuannya dibentuk kelompok tersebut yakni untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove).

Responden lainnya dalam penelitian ini adalah *key person* dari Dinas Perhutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Madura, Bidang Pariwisata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Data dan informasi pengelolaah Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pamekasan digali dari tiga Lembaga tersebut di atas.

Analisis Penelitian

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini, yakni dengan cara wawancara terhadap beberapa pihak yang memiliki keterkaitan terhadap pengelolaan wisata alam tersebut, serta melakukan observasi langsung ke lokasi wisata untuk melihat dan menyesuaikan data yang diterima oleh informan dengan realitas di lapangan. Responden yang diambil dalam penelitian ini diantaranya, Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau" Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Madura, Bidang Pariwisata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ruang dan analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk menganalisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Setelah dilakukan analisis penelitian, selanjutnya, dilakukan penyusunan strategi dalam menentukan pengembangan Wisata Alam Kopi Mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Keterkinian Wisata Alam Kopi Mangrove Desa Lembung, Galis, Pamekasan

Jenis kopi mangrove yang dilestarikan dan dimanfaatkan di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan menurut Kelompok Tani Hutan 'Sabuk Hijau' ialah jenis (1) *Rizophorastylusa* (jenis ini juga terbagi dua yakni *macronata* dan *stylusa*) (2) *Apicinia*, dan (3) *Sonyracia* (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pamekasan, 2015). Dari tiga jenis tersebut, satu jenis yakni mangrove *Rizophorastylusa stylusa* paling banyak dilestarikan. Alasannya, karena tingkat kehidupannya tinggi dan populasinya lebih banyak, sehingga mudah untuk dikembangkan. Saat ini, hampir setiap air laut surut, 500 hingga 1,000 bibit hutan mangrove ditanam di lokasi tersebut. Hal itu dilakukan agar jumlah pohon mangrove juga banyak, akibatnya kopi mangrove juga banyak. Di kawasan ini, kopi mangrove sendiri ditanam berjejer dengan jarak 1 m². Kelompok petani hutan, menggunakan perahu rakyat sebagai alat transportasi, untuk melakukan pelestarian dan pengawasan terhadap pohon dan kopi mangrove sepanjang 4 km. Di lokasi itu, juga dibangun pos kerja terbuat dari bambu, sebagai tempat peristirahatan sementara para pelestari dan pengawas kopi mangrove. Namun, kondisi pos kerja tersebut saat ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, pos kerja tersebut dibuat dari kayu dan papan serta asbes, sehingga pos kerja tetap aman meskipun dihantam ombak. Pengunjung wisata alam kopi mangrove sendiri, saat ini masih sangat sedikit. Sebab, infrastruktur dan sarana belum terbangun dengan baik. Jika pengunjung ingin melihat dan memetik kopi mangrove, dari jarak dekat, pengelola kawasan hutan lindung mangrove itu, hanya menyediakan perahu rakyat. yang kapasitasnya 5-7 penumpang. Sementara sarana lain, untuk menarik perhatian pengunjung juga belum ada. Hanya saja, pengelola menyediakan lahan tambak pemancingan ikan.

Hasil Kajian Melalui Analisis Penelitian

Dari hasil wawancara tersebut, disebutkan banyak desa yang ada di Kabupaten Pamekasan, memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi desa wisata hutan mangrove (Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2013) di antaranya Desa Ambat, Desa Branta Tinggi, Desa Tlanakan, Desa Tlesah, Desa Kramat, Desa Bandaran, Desa Branta Pesisir yang Berada Di Kecamatan Tlanakan. Sementara di

Kecamatan Pademawu, di antaranya Desa Beddurih, Desa Bunder, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu Timur, Desa Tanjung Dan Desa Pagagan. Selanjutnya, Kecamatan Larangan yakni Desa Montok dan Desa Kaduara Barat. Sementara untuk Kecamatan Galis, yakni Desa Konang, Desa Pandan, Desa Polagan, dan Desa Lembung.

Hasil wawancara dengan responden menyebutkan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wisata alam berkelanjutan. Su'udi & Suwandono (2015) dan Fattah dkk., (2021) menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan wisata mangrove yang berkelanjutan, di antaranya, aspek perencanaan pariwisata, pengembangan pariwisata, potensi wisata dan permasalahan. Melihat beberapa aspek tersebut, dapat dinyatakan dari sekian desa potensi hutan mangrove, hanya Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan, yang memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata kopi *mangrove*. Hal ini pula, juga sesuai dengan elemen pariwisata yakni elemen kelembagaan, elemen infrastruktur, elemen transportasi, elemen fasilitas, dan elemen atraktif (Oka, 1996). Oleh karena itu, dengan hadirnya lokasi wisata alam berupa kopi mangrove ini, destinasi wisata di Kabupaten Pamekasan, tidak hanya terfokus kepada wisata religi Batu Ampar di Kecamatan Proppo, wisata pesisir Pantai Talang Siring di Kecamatan Larangan, dan wisata Api Tak Kunjung Padam di Kecamatan Tlanakan, melainkan pula Wisata Alam Kopi *Mangrove* di Desa Lembung, Kecamatan Galis.

Hasil Kajian Melalui Analisis Ruang

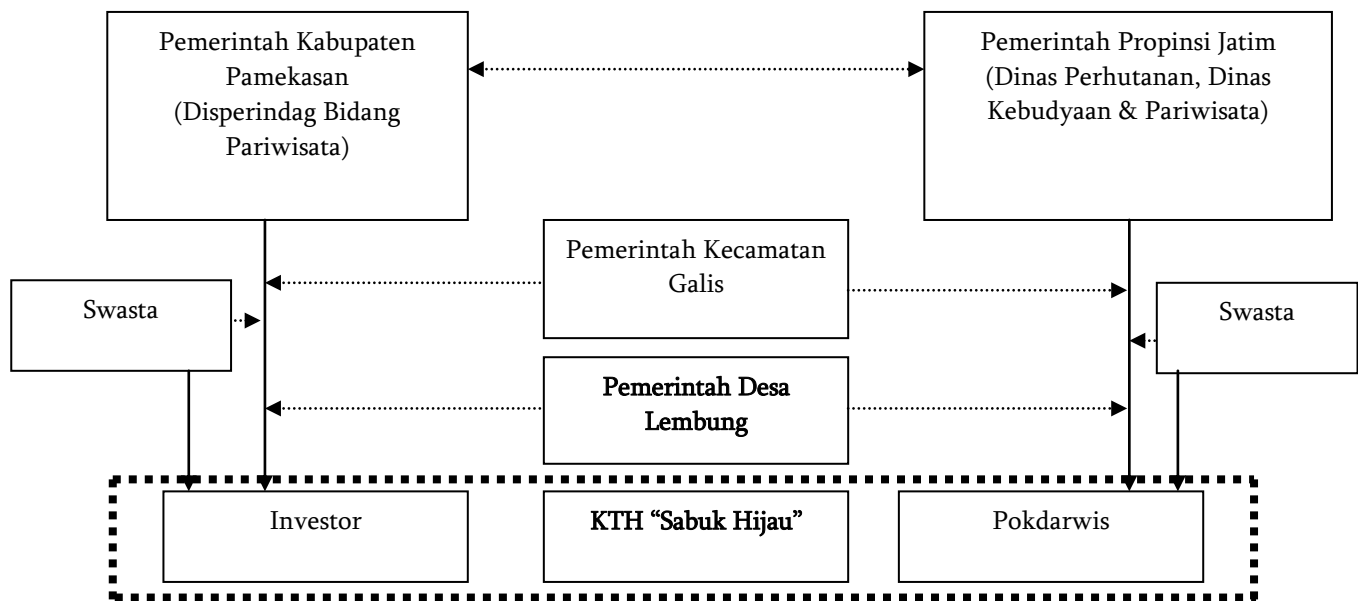
Tujuan analisis kebutuhan ruang yaitu untuk mengetahui, pemetaan wilayah pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. Salah satunya pemetaan zona pendukung tempat wisata alam, di antaranya zona pemukiman, zona perdagangan dan jasa, zona hiburan serta zona edukasi. Zona-zona tersebut diperlukan dalam rangka pengembangan wisata alam kopi mangrove (Arfan dkk., 2022). Sementara untuk pelayanan, diperlukan fasilitas tempat parkir, musholla, dan toilet. Selain itu, luas lahan yang berada di lokasi pengembangan wisata kopi mangrove, di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yakni sebanyak 25 Ha. Dengan demikian, bisa dilakukan pemetaan sebagai berikut: kebutuhan ruang untuk penyediaan ruang fisik sebanyak 19.65 Ha, dan sirkulasi sebesar 30%

dari luas lahan terbangun yakni 5.35 Ha. Namun, luas lahan ini sewaktu-waktu bisa dikembangkan dan diperluas. Sebab, terdapat beberapa lahan di sekitar lokasi tersebut, milik PT Perhutani Madura, yang digunakan sebagai tambak garam secara ilegal (KPH, 2015).

Konsepsi Pengelola terhadap Pengembangan Wisata Kopi *Mangrove*

Konsep pengelolaan manajemen pada pengembangan wisata kopi *Mangrove*, di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, saat ini masih terpusat di Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau". Kelompok ini bergerak melakukan pelestarian, pengawasan, serta pemanfaatan wisata alam kopi *mangrove*. Sementara, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Madura, sebagai pemilik lahan, hanya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hutan mangrove, yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya dalam perencanaan pengembangan wisata kopi mangrove, di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan diperlukan konsepsi pengelola manajemen, secara bersama-sama untuk mewujudkan managerial yang mapan dalam pengelolaannya.

Adapun konsepsi pengelolaan dirancang berdasarkan kondisi eksisting pengelolaan dan kebutuhan seluruh pihak, yang berperan dalam pengembangan wisata kopi Mangrove, di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang menghambat rencana pengelolaan wisata alam tersebut, bisa segera teratasi dengan baik. Manajemen pengelolaan wisata alam kopi mangrove diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata alam kopi mangrove secara keseluruhan. Peran serta beberapa pihak dalam mendorong wisata alam kopi mangrove ini sangat diperlukan. Terutama peran serta masyarakat sekitar lokasi wisata alam kopi mangrove. Ramadoan dkk. (2013) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan wisata hutan diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kegiatan pembimbingan dari penyuluh (dari pemerintah) kepada masyarakat dan kelompok tani juga berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasinya (Sasmita dkk., 2022). Konsep pengelolaan pengembangan wisata kopi mangrove, di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, bisa dilihat dalam Gambar 1.



Sumber: Hasil Wawancara (2021)

Gambar 1. Diagram Alur Pengembangan Wisata Alam Kopi *Mangrove* Di Desa Lembung, Galis, Pamekasan.
 → : menunjukkan hubungan instruktif (dari lembaga yang lebih tinggi ke lembaga yang lebih rendah),→ : menunjukkan hubungan koordinatif (antar lembaga yang setara kedudukannya), dan [---] : menunjukkan bagian inti dari penelitian ini (objek penelitian).

Deskripsi Masalah Pengembangan Wisata Kopi Mangrove

Pengembangan Wisata Alam Kopi Mangrove di Desa Lembung memerlukan kerjasama seius antara masyarakat pengelola hutan mangrove, pemilik lahan yakni KPH Madura dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Permasalahan yang ditemukan di sejumlah daerah lainnya adalah partisipasi masyarakat yang rendah dalam sebuah pengembangan lokasi wisata. Namun pada kasus Desa Lembung ini justru sebaliknya, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Terlebih dalam menjaga kelestarian hutan mangrove, memanfaatkan kopi mangrove, serta menyusun konsep pengembangan wisata kopi mangrove secara modern oleh masyarakat.

Hanya saja, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, ataupun pemilik lahan yakni Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Madura, belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap rencana strategis pengembangan wisata alam kopi mangrove tersebut. Setidaknya masyarakat pengelola Hutan Mangrove di Desa Lembung, memerlukan jalan keluar berupa promosi terhadap pihak ketiga. Misalnya melakukan penganggaran melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. atau menawarkan terhadap investor, sehingga Kelompok Tani Hutan “Sabuk

Hijau” Desa Lembung, sebagai kelompok yang secara intens melakukan Pelestarian, Pengawasan dan Pemanfaatan hutan mangrove, dapat terus berinovasi untuk terus mengembangkan wisata alam kopi mangrove, di tengah problematika rencana pengembangan wisata alam kopi mangrove.

Sumbangan Pemikiran terhadap Upaya Konservasi

1) Tingginya Partisipasi Masyarakat, Di tengah Penyerobotan Lahan Hutan

Kasus penyerobotan lahan milik negara, yang pengelolanya diberikan kepada PT Perhutani Madura, terjadi di Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Penyerobotan tersebut diakui dilakukan oleh oknum masyarakat setempat. Dimana peruntukannya merupakan lahan untuk hutan mangrove. Kini karena kepemilikannya sudah menjadi milik pribadi, dijadikan lokasi tambak garam, yang dapat mengancam konservasi lingkungan.

Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat Desa Lembung, yang masih bertetangga dengan kecamatan tersebut, untuk melakukan konservasi terhadap hutan mangrove di desanya, serta melakukan pemanfaatan terhadap kopi mangrove. Baik untuk dikelola sebagai konsumsi ataupun dikelola untuk pemanfaatan

lokasi wisata. Hal ini seharusnya, terus didorong oleh pemerintah.

Hasil wawancara dengan Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau", yang mayoritas pengurus dan anggota merupakan masyarakat pesisir Desa Lembung, menjelaskan bahwa selama ini konsep yang dijalankan merupakan ide kreatif yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Hanya saja, dalam pengembangannya, kelompok tersebut selalu terkendala ketersediaan fasilitas yang ada. Masyarakat Desa Lembung, memiliki kesadaran yang tinggi dalam melestarikan, dan menjaga sejenggal tanah milik negara yang ditanami pohon mangrove. Hal ini merupakan kesadaran masyarakat yang perlu didukung ditengah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir.

Pemerintah, mulai pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat, harus mampu merespon inisiatif masyarakat Desa Lembung tersebut. Hal ini bertujuan agar hutan mangrove dan pengembangan wisata kopi mangrove di desa tersebut dapat didorong sebaik mungkin, baik pelestarian maupun pengelolannya. Pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan biaya sosialisasi terhadap dampak yang ditimbulkan, akibat abrasi laut.

Namun, pemerintah hanya perlu mendorong kelompok-kelompok masyarakat pecinta lingkungan pesisir seperti Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau", untuk menggerakkan dan menyentuh masyarakat lain, yang kesadarannya masih rendah dalam pengelolaan hutan mangrove. Sebab, arahan, ajakan, dan himbauan kepada masyarakat akan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan lebih mudah diterima oleh golongan masyarakat lain yang memiliki profesi yang sama daripada menerjunkan tim bercelana dari dinas setempat.

Misalnya, sosialisasi bahaya abrasi laut. Mayoritas masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan ataupun petambak ikan atau garam (Prihantini dkk., 2016). Maka yang memberikan sosialisasi terhadap dampak abrasi laut dan penanggulangannya, ialah masyarakat lain, yang berprofesi sama dengan masyarakat yang dijadikan target. Keterlibatan tokoh masyarakat sekitar pesisir,

sangat menguntungkan terhadap pencapaian sebuah proses yang diinginkan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan pengembangan wisata alam (Santoso dkk., 2015; Prihantini dkk., 2019; Susana dkk., 2020).

2) Mendorong Terbentuknya Komunitas Masyarakat Pecinta Hutan

Konservasi hutan memang sangat dibutuhkan, khususnya konservasi hutan mangrove. Pemerintah melalui tokoh masyarakat pesisir, mendorong terbentuknya komunitas masyarakat pecinta hutan mangrove.

Sebab, melalui komunitas masyarakat tersebut, akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat, dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Jika sudah terbentuk komunitas, maka akan muncul sifat memiliki dalam menjaga hutan (Ruhimat, 2015; Surayya dkk., 2020).

Pemerintah tidak perlu lagi membentuk satuan tugas ataupun bidang yang bertugas melakukan penanaman, pelestarian ataupun pengawasan terhadap hutan lindung. Buktinya, masyarakat Desa Lembung telah membentuk Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau", justru tanpa diminta oleh pemerintah setempat, melakukan pembibitan pohon mangrove, melakukan penanam pohon mangrove secara berkala, mendirikan pos kerja, hingga melakukan pengawasan dengan melakukan patroli secara berkala disetiap petak hutan *mangrove*. Tanpa, harus dibayar sepeserpun oleh pemerintah, sebagai pemilik lahan.

Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk menyusun strategi pengembangan wisata alam kopi mangrove dengan melakukan sinkronisasi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Berdasarkan analisis SWOT maka strategi yang terbentuk relevan dengan kondisi internal maupun eksternal. Adapun hasil analisis SWOT dirumuskan dalam bentuk matriks SWOT yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT

	<i>STRENGTHS</i> (S)	<i>WEAKNESSES</i> (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan mangrove cukup luas 2. Kelompok Tani Hutan (KTH) "SABUK HIJAU" 3. Memiliki konsep pengelolaan pengembangan wisata mangrove 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan mangrove belum dimanfaatkan secara maksimal 2. Infrastruktur dan sarana belum memadai 3. Gangguan cuaca dan ombak laut 4. Partisipasi masyarakat masih rendah 5. Belum maksimalnya dukungan pemerintah
<i>OPPORTUNITIES</i> (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas masyarakat pelestari hutang mangrove 2. Pemanfaatan kopi mangrove 3. Pemasaran kopi mangrove secara luas 4. Tempat wisata alam kopi mangrove 5. Menambah PAD kabupaten pamekasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun desain dan penataan wisata hutan mangrove (S1, S2, S3, O1, O4) 2. Inisiasi kelompok usaha dan pemasaran kopi mangrove (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4, O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan wisata kopi mangrove (W1, W4, W5, O1, O4, O5) 2. Memfasilitasi infrastruktur dan sarana wisata kopi mangrove (W1, W2, W5, O1, O2, O4, O5) 3. Memposisikan wisata kopi mangrove yang aman dari gangguan ombak laut (W3, W5, O1, O4)
<i>THREATS</i> (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan fungsi hutan mangrove 2. Pengrusakan bibit hutan mangrove 3. Penebangan pohon mangrove 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTH Sabuk Hijau dan Pemda menyusun aturan pengelolaan hutan mangrove (S2, S3, T1, T2, T3) 2. Mensosialisasikan aturan pengelolaan hutan mangrove (S2, T1, T2, T3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan hutan mangrove berbasis pelestarian dan pariwisata (W1, W3, W4, T1, T2, T3) 2. Menjalin kerjasama dengan stakeholder luar dalam menjaga dan mengelola hutan mangrove (W1, W2, W4, W5, T1, T2, T3)

Berdasarkan tabel matriks SWOT, perumusan strategi pengembangan wisata alam kopi mangrove menghasilkan 9 strategi utama yang dikelompokkan menjadi empat kelompok Strategi SWOT, yaitu:

Strategi S-O (*Strengths- opportunities*)

- 1) Menyusun desain dan penataan hutan mangrove (Menggunakan Strengths 1, Strengths 2, Strengths 3, Opportunities 1, Opportunities 4).
- 2) Inisiasi kelompok usaha dan pemasaran kopi mangrove (Menggunakan Strengths 1, Strengths 2, Strengths 3, Opportunities 1, Opportunities 2, Opportunities 3, Opportunities 4, Opportunities 5).

Strategi W-O (*Weaknesses - opportunities*)

- 1) Bekerjasama dengan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan wisata kopi mangrove (Menggunakan Weaknesses 1, Weaknesses 4, Weaknesses 5, Opportunities 1, Opportunities 4, Opportunities 5).
- 2) Memfasilitasi ifrastruktur dan sarana wisata kopi mangrove (Menggunakan Weaknesses 1, Weaknesses 2, Weaknesses 5, Opportunities 1, Opportunities 2, Opportunities 4, Opportunities 5).
- 3) Memposisikan wisata kopi mangrove yang aman dari gangguan ombak laut (Menggunakan

Weaknesses 3, Weaknesses 5, Opportunities 1, Opportunities 4).

Strategi S-T (*Strengths- threats*)

- 1) KTH Sabuk Hijau dan Pemda menyusun aturan pengelolaan hutan mangrove (Menggunakan Strengths 2, Strengths 3, Threats 1, Threats 2, Threats 3).
- 2) Mensosialisasikan aturan pengelolaan hutan mangrove (Menggunakan Strengths 2, Threats 1, Threats 2, Threats 3).

Strategi W-T (*Weaknesses - threats*)

- 1) Pengelolaan hutan mangrove berbasis pelestarian dan pariwisata (Menggunakan Weaknesses 1, Weaknesses 3, Weaknesses 4, Threats 1, Threats 2, Threats 3).
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menjaga dan mengelola hutan mangrove (Menggunakan Weaknesses 1, Weaknesses 2, Weaknesses 4, Weaknesses 5, Threats 1, Threats 2, Threats 3).

Perumusan strategi SWOT yang dihasilkan dari kelompok strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi WT. Selanjutnya, strategi-strategi tersebut dikombinasikan antar strategi yang memiliki kemiripan dan relevan untuk menghasilkan beberapa strategi inti. Adapun strategi-strategi inti hasil kombinasi antara lain:

Strategi I : Menyusun desain dan penataan wisata hutan mangrove

Strategi II : Inisiasi kelompok usaha dan pemasaran kopi mangrove

Strategi III : Pemerintah daerah bekerjasama dan memfasilitasi infrastruktur dan sarana wisata kopi mangrove

Strategi IV : Menyusun dan mensosialisasikan aturan pengelolaan hutan mangrove

Strategi V : Melibatkan dan bekerjasama dengan stakeholder luar dalam mengelola hutan mangrove

Rencana Pengembangan Wisata Kopi Mangrove

Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau" memiliki rencana pengembangan wisata kopi mangrove, baik rencana pengembangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Rencana Jangka Pendek

- 1) Melakukan desain penanaman hutan mangrove secara sederhana. Namun, memiliki daya tarik sendiri, terhadap pengunjung.
- 2) Memperbanyak perahu-perahu rakyat yang disandarkan di sekitar lokasi wisata kopi

mangrove. Hal ini bertujuan untuk mempermudah transportasi pengunjung.

- 3) Memperbaiki dan menambah pendirian pos kerja Kelompok Tani Hutan "Sabuk Hijau" secara berkala, sebagai tempat istirahat pengunjung.

Rencana Jangka Menengah

- 1) Menggarap lahan tambak udang serta tambak kepiting yang di sekitarnya dikelilingi hutang mangrove.
- 2) Menggarap kolam pemancingan ikan, yang disekitarnya dikelilingi hutan mangrove.
- 3) Melakukan budi daya lebah madu, di pohon mangrove Desa Lembung.
- 4) Mempermudah akses jalan menuju lokasi wisata alam kopi mangrove.

Rencana Jangka Panjang

- 1) Bersama pemerintah atau investor mendirikan *Tracking Jogging* atau jembatan untuk olahraga *jogging* yang mengelilingi sepanjang wisata kopi mangrove.
- 2) Mendirikan tempat terapi terhadap pasien yang membutuhkan oksigen lebih di sekitar pantai pesisir wisata alam kopi mangrove.
- 3) Mendirikan rumah makan terapung yang nyata, di sekitar wisata alam kopi mangrove, dengan maksud agar pengunjung bisa menikmati wisata alam kopi mangrove, sambil menikmati makanan di wahana laut pesisir kopi mangrove.

Implikasi Kebijakan

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan dalam pengembangan wisata kopi mangrove ini, yakni (1) Pemerintah Kabupaten Pamekasan seharusnya dapat menangkap peluang, wisata alam kopi mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis sebagai destinasi wisata alternatif yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Dalam pengembangannya, Pemerintah juga harus memerhatikan beberapa aspek, diantaranya, aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Pemerintah segera menganggarkan Pengembangan wisata alam kopi mangrove, Desa Lembung, Kecamatan Galis dapat diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan. (4) Jika APBD tidak memungkinkan, Pemerintah diharapkan segera mencari atau melakukan pendekatan dengan investor atau sejumlah perusahaan milik negara ataupun swasta melalui program *Corporate Social*

Responsibility (CSR). (5) Pihak swasta diharapkan berperan aktif dalam pengembangan wisata alam tersebut, khususnya dalam penganggaran pengembangan wisata alam tersebut sebagai salah satu langkah nyata dalam melestarikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. (6) Kepada masyarakat, khususnya di lokasi wisata tersebut, diharapkan semangatnya semakin tinggi dan tidak patah semangat dalam rangka pengembangan wisata alam. (7) Apabila pengembangan wisata tersebut tercapai, hendaknya masyarakat ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, target perencanaan bisa terukur dengan baik dan sempurna. (8) Masyarakat hendaknya tetap memiliki etika yang baik terhadap pengunjung yang akan berkunjung ke lokasi tersebut.

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, yang dikuatkan dengan pernyataan responden dalam penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa pengembangan potensi wisata alam kopi mangrove, Desa Lembung Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan memiliki potensi besar, untuk dijadikan destinasi wisata sebagai alternatif dari beberapa destinasi wisata lainnya di Kabupaten Pamekasan. Hanya saja, dalam proses pengembangannya ditemukan beberapa masalah-masalah yang menghambat, yang perlu penyelesaian secara cepat. Selain itu, membuka peluang investasi kepada masyarakat sekitar, pemerintah ataupun pihak investor yang berkeinginan untuk mengembangkan wisata tersebut. Masyarakat pelestari lingkungan hutan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan tidak bisa dilepas begitu saja oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Perlu pembimbingan dan pendampingan terhadap pengembangan wisata tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat lima strategi yang dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, yakni (1) menyusun desain dan penataan wisata hutan mangrove; (2) inisiasi kelompok usaha dan pemasaran kopi mangrove; (3) pemerintah daerah bekerjasama dan memfasilitasi infrastruktur dan sarana wisata kopi mangrove; (4) menyusun dan mensosialisasikan aturan pengelolaan hutan mangrove; dan (5) melibatkan dan bekerjasama dengan stakeholder luar dalam mengelola hutan mangrove. Banyak cara yang bisa ditempuh oleh

Pemerintah, di antaranya, mengalokasikan anggaran untuk pengembangan wisata tersebut, atau mendorong perusahaan milik negara ataupun swasta, untuk memberikan anggaran pengembangan pariwisata di Kabupaten Pamekasan, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ataupun program pendampingan modal melalui koperasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yakni KTH 'Sabuk Hijau', Disperindag Kabupaten Pamekasan, Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, dan semua pihak yang belum mampu dicantumkan dalam bagian ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A, M F Juanda, Maddatuang, R Umar, R Maru, dan Anshari. 2022. Strategi pengelolaan ekowisata mangrove Pulau Bangkombangkoang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 19(1): 49-62.
- [BPS] Badan Pusat Statistik, 2015. Pamekasan dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pamekasan. 2013. *Ensiklopedia Pamekasan*. Bappeda Kabupaten Pamekasan.
- Cruz-Torres, ML. 2000. Pink gold rush: Shrimp aquaculture, sustainable development, and the environment in Northwestern Mexico. *Journal of Political Ecology*. 7: 63-90.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pamekasan. 2015. *Data Hutan Mangrove dan Hutan Rakyat*. Dishutbun Pamekasan.
- Fattah, M, CA Intyas, TN Utami, D Sofiati, dan KI Abdillah. 2021. Pemetaan posisi keunggulan ekowisata Bee Jay Bakau Resort. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 18(2): 129-139.
- Febryano, IG, D Suharjito, DDC Kusmana, dan A Hidayat. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125 – 142.

- [KPH] Kesatuan Pengelola Hutan. 2015. Data Hutan Mangrove. Tersedia online pada: https://www.menlhk.go.id/index.php/site/sin_gle_post/1471
- Lugina, M, Indartik, dan MA Pribadi. 2019. Valuasi ekonomi ekosistem mangrove dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga: Studi kasus Desa Pemogan, Tuban dan Kutawaru. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 16(3):197-210.
- Oka, Y. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa.
- Prihantini C I, Y Syaikat, dan A Fariyanti. 2016. Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*. 4 (1): 1-16.
- Prihantini, C I, Lutfiyanto, Musoffan, dan Darwis. 2019. Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pok-Darwis) sebagai Penggerak Kemajuan Wisata Edukasi Jumiang *Journal ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 7 (2): 336-341.
- Sasmita, Y, C I Prihantini, Nursalam, Musoffan, dan Darwis. 2022. Analisis Strategi Pengembangan Dengan Analisis Swot Sebagai Kawasan Wisata Unggulan Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Jumiang Kabupaten Pamekasan). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 8 (1): 319-335.
- Ramadoan, S, P Muljono, dan I Pulungan. 2013. Peran PKSM dalam meningkatkan fungsi kelompok tani dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima, NTB. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10 (3): 199 – 210.
- Ruhimat, IS. 2015. Tingkat motivasi petani dalam penerapan sistem agroforestry. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 12(2): 1-11.
- Santoso, H, H Muntasib, H Katodiharjo, dan R Soekmaedi. 2015. Peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 12 (3): 197-211.
- Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Administratif. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Surayya, Q, C Kusmana, dan L Sundawati. 2020. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 17(2): 101-115.
- Susana, M, C Kusmana, dan HS Arifin. 2020. Potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 17(3):193-208.
- Syah, F, L Sundawati, dan Bahruni. 2019. Nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 16 (2): 115-126.
- Su'udi, A, dan D Suwandono. 2015. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pembiayaan Pembangunan Wisata Hutan Mangrove, Desa Bundono (Skripsi). Universitas Dipenogoro.
- Tambunan, P. 2010. Potensi dan kebijakan pengembangan lontar untuk menambah pendapatan penduduk. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(1): 27-45.
- Triyanti, R, M Firdaus, dan R Pramoda. 2017. Total nilai ekosistem mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 14(3): 219-236.